

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh Sumatera Barat

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh Sumatera Barat



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZULPIKAR, SH.,M.H.
Nip : 197702262002121003
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
Nip : 195606201985031003
Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
NIP. 195606201985031003

Payakumbuh, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,

AHMAD ZULPIKAR, S.H., M.H.
NIP. 197702262002121003

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	89%
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	4%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	89%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,4%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang di sampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Program 4	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran 8
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	Rp. 3.833.156.000,-
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	95%	Rp. 1.047.602.000,-
	- Non Operasional Satker Daerah	95%	Rp. 27.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung .	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Sarana Pendukung Disabilitas) berupa Kursi Roda	100%	Rp. 3.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	- Pos Bantuan Hukum	100%	Rp. 24.000.000,-
	- Pendaftaran Berkas Perkara.	95%	Rp. 13.900.000,-
	- Penetapan Hari Sidang.	95%	Rp. 9.100.000,-
	- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.	95%	Rp. 19.650.000,-
	- Minutasi dan Upaya Hukum.	95%	Rp. 3.000.000,-
	- Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.	95%	Rp. 4.100.000,-
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.	95%	Rp. 6.200.000,-
	- Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama.	95%	Rp. 2.600.000,-
	- Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	95%	Rp. 4.450.000,-

Pihak Kedua,

DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
NIP. 195606201985031003

Payakumbuh, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,

AHMAD ZULPIHAR, S.H., M.H.
NIP. 197702262002121003